

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1998 telah mengalami perubahan sistem dari yang sebelumnya menggunakan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada masa itu pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Adanya sistem ini kemudian diubah menjadi desentralisasi yang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah yang memaparkan desentralisasi yang berarti diserahkannya urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Namun Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Adapun otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terkait pemerintahan daerah adalah segala wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur terkait urusan pemerintahannya secara mandiri dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang diberlakukan (Putra & Varina, 2021).

Terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan dan ruang lingkup pemerintah dan berdampak pula pada sistem keuangan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah tersebut, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang dikelola dengan baik. Oleh sebab itu dengan dilakukannya penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah tentunya dapat mewujudkan sistem keuangan pemerintahan yang baik pula (Putra & Varina, 2021).

Diterbitkannya peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hasil sinergitas antara beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara diantaranya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (BPKAD Kabupaten Kuningan, 2022).

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibawahnya termasuk didalamnya membahas mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai turunan dari undang-undang tersebut dari sisi keuangan negara yang mengubah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu adanya peraturan ini menjadi dasar atas penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Kemudian di dalam Bab V juga disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, terbuka, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat (BPKAD Kabupaten Kuningan, 2022).

Kegiatan pengelolaan secara efektif, ekonomis, efisien, terbuka, tertib, bertanggung jawab, dan taat pada aturan perundang-undangan menjadi latar belakang dari lahirnya sebuah sistem dalam akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjadi langkah awal dari dimulainya pengelolaan keuangan negara. Dalam rincian undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia paling lambat 5 tahun untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak undang-undang ini diberlakukan (Putra & Varina, 2021)

Diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan diatur dalam pasal 7 PP 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: Diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dapat dilakukan secara bertahap dari yang sebelumnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan dalam bentuk SAP Berbasis Akrual. Adapun ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2013 diterbitkanlah permendagri nomor 64 Tahun 2013 yang membahas tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Adanya permendagri ini menjadi suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam menggunakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015 (Haditheo & Ali, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mulai diterapkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia. Hal tersebut memberi kemajuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Diterapkannya akuntansi basis akrual tersebut dianggap lebih baik daripada menggunakan basis kas, hal ini dikarenakan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lebih akurat, komprehensif, relevan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial (Henukh et al., 2020).

Pada hakikatnya semua pernyataan yang ada pada standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun dan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, komponen-komponen tersebut telah dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen-komponen laporan keuangan tersebut kemudian disusun dengan menggunakan kodifikasi akun 1 sampai dengan 9 sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Akun Standar (BAS).

Tujuan dari diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait Penyajian laporan keuangan yaitu untuk mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) sebagai suatu bentuk usaha dalam meningkatkan keterbandingan dalam laporan keuangan baik itu terhadap anggaran antar periode, maupun terhadap antar entitas pelaporan. Adapun basis akuntansi yang digunakan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu menggunakan basis akrual. Setiap entitas pelaporan wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangannya dengan menggunakan basis akrual baik dalam proses pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan entitas (Haditheo & Ali, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdapat dua unit entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi ialah suatu unit dalam pemerintahan yang bertugas mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban serta bertugas menyelenggarakan serta menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di selenggarakannya. Entitas yang kedua yaitu entitas pelaporan ialah suatu unit pemerintah yang terdiri dari satu entitas akuntansi atau lebih yang berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang wajib menyajikan laporan pertanggung jawabannya berupa laporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial statement*) (Karjono & Sulistianingsih, 2020).

Huang et al. (1999) menjelaskan bahwa sebuah informasi akan bernilai manfaat jika informasi tersebut dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh setiap penggunanya. Oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah wajib memperhatikan terkait informasi apa saja yang harus disajikan dalam laporan keuangan guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni bersifat relevan (manfaat prediktif, manfaat umpan

balik, tepat waktu, lengkap), Andal (penyajian secara wajar/ jujur, netral, dapat diuji kebenarannya), dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Suhendar & Suhaeti, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dan menjadi suatu persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan ini menjadi sebuah dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak luar eksekutif. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga berguna bagi para penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi apa saja yang harus dicantumkan untuk kemudian disajikan kepada pihak luar organisasi (Irmayani, 2020).

Digunakannya Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang bersifat andal serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pengambilan keputusan. Jika standar umum ini tidak ada, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan mengalami perbedaan antar daerah sehingga akan memunculkan persoalan-persoalan baru pada level nasional. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan daerah harus disajikan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah, meskipun belum dapat sepenuhnya mengikuti standar ini (Irmayani, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tinggi apabila kita bercermin pada perspektif ekonomi islam maka terdapat beberapa kaidah dan teknik dalam mengelola laporan keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah tersebut adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban dalam menegakkan kebenaran, kewajiban dalam melindungi keadilan, dan kewajiban dalam mengemban amanah. Dalam hal ini yaitu mengenai hak dan tanggungjawab seseorang ketika mengelola laporan keuangan telah jelas diatur secara ketat dalam dalil-dalil yan terkandung

dalam Al-Qu'an dan hukum tersebut harus diterapkan dan terus dikembangkan seperti halnya hukum-hukum lainnya.

Seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

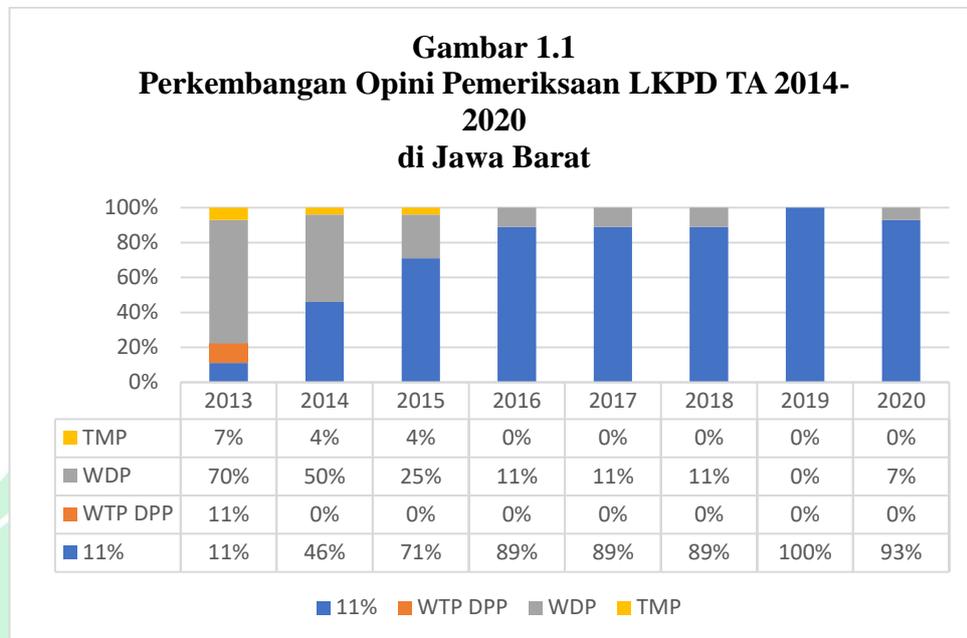
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58).

Adapun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa hasil opini dari badan pemeriksaan keuangan (BPK). Ketika BPK menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD, maka dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Adapun hasil opini yang digunakan oleh BPK dalam melakukan penilaiannya menggunakan empat opini yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), serta pernyataan menolak dalam memberi opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (Rajab, 2020).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu entitas dalam suatu pemerintahan daerah yang dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Kuningan yang bertugas mengelola apbd dan pendapatan daerah lainnya yang masuk ke kas pemerintah daerah dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atas pengelolaan keuangan daerah tersebut untuk kemudian menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan perbendaharaan daerah. Tentunya dalam proses penyajian LKPD tersebut harus mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jawa Barat tren opini atas laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2013-2020 terus mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar diagram berikut:



Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dari total 28 entitas pemda yang ada di provinsi jawa barat sebanyak 26 LKPD (93%) mendapat opini WTP atas laporannya dan 2 LKPD lainnya (7%) mendapat opini WDP atas laporannya (BPK RI, 2020).

Diantara 26 LKPD yang mendapat opini WTP, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu LKPD yang mendapat opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut yakni dari tahun 2014-2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2021, Kabupaten Kuningan kembali menerima opini WTP yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga secara kumulatif prestasi ini telah diraih 8 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yakni dari Tahun 2014 hingga tahun 2021. Raihan Penghargaan WTP ke delapan kali ini menjadi bukti yang membanggakan dan menggembirakan sebagai bentuk konsistensi ketaatan kepada peraturan

perundang-undangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (BPKAD Kabupaten Kuningan, 2021).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa hasil laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berjalan secara konsisten. Akan tetapi meskipun mendapat opini WTP bukan berarti tidak ada masalah yang ditemui lagi, masih ada beberapa catatan dari pihak BPK agar lebih diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Misal pada hasil opini WTP tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mendapat catatan dari BPK mengenai masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain penatausahaan aset tetap yang masih belum memadai (BPK RI, 2020).

Dragija, dkk., (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual masih dalam tingkat ketidaksesuaian yang tinggi. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah (Henukh et al., 2020).

Beberapa kendala yang dihadapi sektor publik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan, kapasitas TI, serta durasi maupun kompleksitas proses pelaksanaan. Beberapa penelitian lain juga mendapat hasil yang tidak jauh berbeda mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual (Henukh et al., 2020).

Sagita (2020) dalam penelitiannya terkait analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada BPKAD Kota Palembang menemukan bahwa penerapan basis akrual dalam laporan keuangan BPKAD Kota Palembang masih belum sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangannya. Ketidaksesuaian ini terjadi pada pada tiga laporan yang disajikannya tidak sesuai dengan tata cara penyajian yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saat ini pemerintah telah berusaha untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sehingga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan bisa terus meningkat. Namun pada kenyataannya tidak semua instansi pemerintahan memahami SAKD tersebut. Hal ini berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) semester I tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang lambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD BPK RI Tahun 2017-2021

LKPD	Opini								Jumlah
	Tahun	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	
2017	441	76	113	21	0	0	18	3	573
2018	443	82	86	16	0	0	13	2	542
2019	485	90	50	9	0	0	6	1	541
2020	486	90	49	9	2	0,3	4	0,7	541
2021	500	92,4	38	7	0	0	3	0,6	541

Sumber: [https://www.bpk.go.id/ihps-IHPS I Tahun 2022](https://www.bpk.go.id/ihps-IHPS%20I%20Tahun%202022)

Hasil pemeriksaan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 bagi pemerintah daerah dari BPK memuat hasil pemeriksaan atas 541 LKPD Tahun 2021, menyatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 (92,4%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 (7%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,6%) LKPD seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1.

Adapun berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 377 dari 414 pemerintah kabupaten (91%), dan 89 dari 93 pemerintah kota (96%). Pencapaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 92%, 80%, dan 92% di tahun 2021 (BPK RI, 2022).

Adapun permasalahan lain yang ditemukan ialah masih sedikitnya literatur jurnal penelitian yang membahas mengenai pemerintahan Kabupaten Kuningan sehingga hal ini menyulitkan bagi masyarakat dan akademisi dalam mengetahui situasi perkembangan mengenai kualitas kinerja pemerintahan Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun salah satunya mengenai kualitas penyajian pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa jurnal penelitian sudah melewati lima tahun terakhir sehingga hal ini kurang bisa dipergunakan dalam menjadikan bahan literature review bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di Kabupaten Kuningan. Hal ini memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan sehingga penelitian ini dapat menjadi bagian dalam memperkaya literatur mengenai Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, menjadi suatu pembahasan yang cukup menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PP 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditemui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapatnya SKPD yang belum memahami terkait penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010.

- 2) Adanya indikasi bahwa pada penyajian Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Masih terdapatnya SKPD yang mendapat opini WDP terhadap LKPD nya.
- 4) Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual masih dalam tingkat ketidaksesuaian yang tinggi.
- 5) Masih ditemukannya beberapa kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- 6) Masih minimnya literatur jurnal yang membahas mengenai pemerintahan Kabupaten Kuningan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah maka perlu diadakannya pembatasan masalah yang hendak diteliti. Dari enam masalah yang telah disebutkan diatas, peneliti hanya akan memfokuskan pada tiga masalah saja yaitu penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, serta kendala dan strategi penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010?
- 2) Bagaimana penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan?

- 3) Apakah penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010?
- 4) Apa saja kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?
- 5) Bagaimana strategi penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

- 1) Bagi Peneliti, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan BPKAD Kabupaten Kuningan serta sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan kualitas keterampilan dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan penelitian (skripsi).
- 2) Bagi Akademisi, hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan mengenai penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Kuningan.

D. Penelitian Terdahulu/Literature Review

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
Sagita (2020) Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan	Kualitatif	Implementasi basis akrual pada laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang masih belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dalam	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan jenis lembaga yang menjadi objek penelitian yaitu	Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang		menyajikan laporan keuangannya. Ketidaksesuaian ini terjadi pada 3 laporan yang disajikannya tidak sesuai dengan tata cara penyajian yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu laporan realisasi anggaran belanja, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Varina (2022) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19	Kualitatif	Implementasi SAP Berbasis AkruaL dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik, namun kompetensi sumberdaya aparturnya masih kurang dan jumlah aparatur yang masih terbatas pada bidang	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitaif dan wilayah kajian terkait Standar Akuntansi Pemerintahan.	Peneliti menggunakan komponen penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL, kendala dalam penerapannya serta strategi penyelesaian

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
		pengelola keuangan dan anggaran.		masalah atas kendala yang dihadapi. Selain itu peneliti melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kuningan.
Lasabuda et al., (2020) Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Peyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.	Kualitatif	Penerapan akuntansi berbasis akrual pada BPKAD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif.	Peneliti melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kuningan.
Prameswari (2020) Analisis Penerapan Standar Akuntansi	Deskriptif Komparatif	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan pemerintah	Fokus penelitian berfokus pada permasalahan yang sama yaitu	Peneliti menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitian di

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi		kabupaten kuantan singingi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.	penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	BPKAD Kabupaten Kuningan
Muliawati (2020) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.	Kualitatif	Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019 kecamatan tegal selatan kota tegal yang terdiri dari: LRA, neraca, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	Peneliti menggunakan tahun anggaran 2021 dan lokasi penelitian dilakukan di BPKAD Kabupaten Kuningan.
Henukh et al., (2020) Analisis Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual	Kualitatif	Pemerintah Kota Kupang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian	Peneliti menggunakan komponen penelitian terkait penerapan standar akuntansi

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
<p>Pada Pemerintah Kota Kupang.</p>			<p>penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.</p>	<p>pemerintahan berbasis akrual, kendala dalam penerapannya serta strategi penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi. Selain itu peneliti melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kuningan.</p>
<p>Sudaryati & Permana (2020)</p> <p>Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan standar akuntansi berbasis akrual untuk tahun fiskal 2015</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan wilayah penelitian terkait penerapan standar akuntansi</p>	<p>Peneliti menggunakan jenis kantor dinas keuangan daerah yaitu BPKAD Kabupaten Kuningan.</p>

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
			pemerintahan berbasis akrual	
Safitri (2022) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Sumbedaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kuantitatif	Implementasi SAKD dan kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah studi empiris pada BPKAD Kota Lampung. Berdasarkan pandangan ekonomi islam, BPKAD Kota Lampung sudah sesuai dengan ajaran islam yaitu kebenaran, kejujuran, dan keadilan.	Jenis lembaga yang diteliti menggunakan jenis lembaga dinas keuangan daerah	Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian dilakukan di BPKAD Kabupaten Kuningan.
Putra & Varina (2021) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan	Kualitatif	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu,	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian terkait	Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu		Khususnya BPKAD sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	
Haditheo & Ali (2022) Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyajikan tujuh komponen laporan keuangan pokok yaitu: LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK yang mengacu pada SAP berbasis akrual.	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
Farshadfar et al. (2022) The usefulness of accrual-based surpluses in the Canadian public sector.	Descriptive Statistics with Sensitivity Analyses	Implementasi akuntansi basis akrual pada sektor publik bermanfaat dalam mengurangi kerancuan dalam operasi arus kas. Selain itu penerapan akuntansi basis akrual ini dapat	Fokus penelitian berfokus pada permasalahan penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan wilayah kajian	Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan.

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
		meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan arus kas masa depan dan surplus, serta menunjukkan bahwa agregat dan surplus terpilah secara positif terkait dengan relevansi dan keandalan.	terkait standar akuntansi sektor publik	
B.Khumawalaa et al., (2020) Real effects of governmental accounting standards: Evidence from GASB statement No. 53 – Accounting and financial reporting for derivative instruments	Descriptive Statistics with Using a hand-collected dataset	Peraturan akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi keputusan nyata pejabat kota dan karena itu berpotensi memiliki implikasi kebijakan publik di luar penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan.	Wilayah penelitian yang digunakan berupa akuntansi pemerintahan.	Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian dilakukan di BPKAD Kabupaten Kuningan.
Fuentes & Borreguero (2018)	Qualitative with electronic questionnaire and	Pemda tidak mencapai kapasitas kelembagaan yang diperlukan dalam mengembangkan	Wilayah penelitian yang digunakan berupa	Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan lokasi

Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	perbedaan
Institutional capacity in the accounting reform process in Spanish local governments Capacidad institucional en el proceso de reforma contable de los ayuntamientos españoles	several interviews	data aplikasi wajib dari instruksi akuntansi baru (Accounting Instruction) serta harus terus mengalokasikan sumber daya dan waktu untuk memperbaiki ya.	akuntansi pemerintahan	penelitian dilakukan di BPKAD Kabupaten Kuningan. Serta fokus penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Jayasinghe et al., (2021) Government accounting reforms in Sub-Saharan African countries and the selective ignorance of the epistemic community: A competing logics perspective	Qualitative with Analysis Content	Akuntabilitas dan transparansi publik dapat diperkuat di negara-negara SSA asalkan ada penerapan yang 'cerdas' dari peraturan dan sistem akuntansi yang ada, daripada sekadar menggantinya dengan GAR skala besar yang diterapkan secara eksternal.	Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan wilayah penelitian terkait akuntansi pemerintahan.	Peneliti melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kuningan dengan fokus penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam akuntansi terdapat suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam melaksanakan teknik-tekniknya. Adapun kerangka konseptual tersebut terdiri atas standar (teknik, prinsip) praktik yang sudah diterima secara umum dikarenakan manfaat dan kelogisannya, standar tersebut kemudian disebut dengan standar akuntansi. Menurut Harahap (2007) mengemukakan bahwa, didalam standar akuntansi ini memuat tentang bagaimana pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal, dan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, serta bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan (Sopyan, 2020). Adanya standar akuntansi sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, relevansi, daya banding, keterpahaman, serta keandalan laporan keuangan (Harefa, 2015). Dalam standar akuntansi ini mencakup semua peraturan dan prosedur yang sudah disusun serta disahkan oleh lembaga resmi. Adanya standar akuntansi menjadi pedoman serta landasan bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas (Sopyan, 2020).

Disajikannya laporan keuangan pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, serta laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Halim dan Abdullah (2008) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penyajian laporan keuangan merupakan suatu hal yang terencana mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Laporan keuangan pada entitas sektor publik merupakan komponen penting guna tercapainya akuntabilitas yang baik pada sektor publik (Ramadhan & Arza, 2021).

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, aset, beban, ekuitas, dan utang dalam pelaporan

keuangan berbasis akrual, serta mengakui belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBD/APBN (PP No. 71, 2010). Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah wajib untuk melaporkan setiap upaya yang telah dilakukan serta bagaimana hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan tersruktur pada suatu periode pelaporan guna kepentingan manajemen, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan antar generasi, serta evaluasi kinerja (Harefa, 2015).

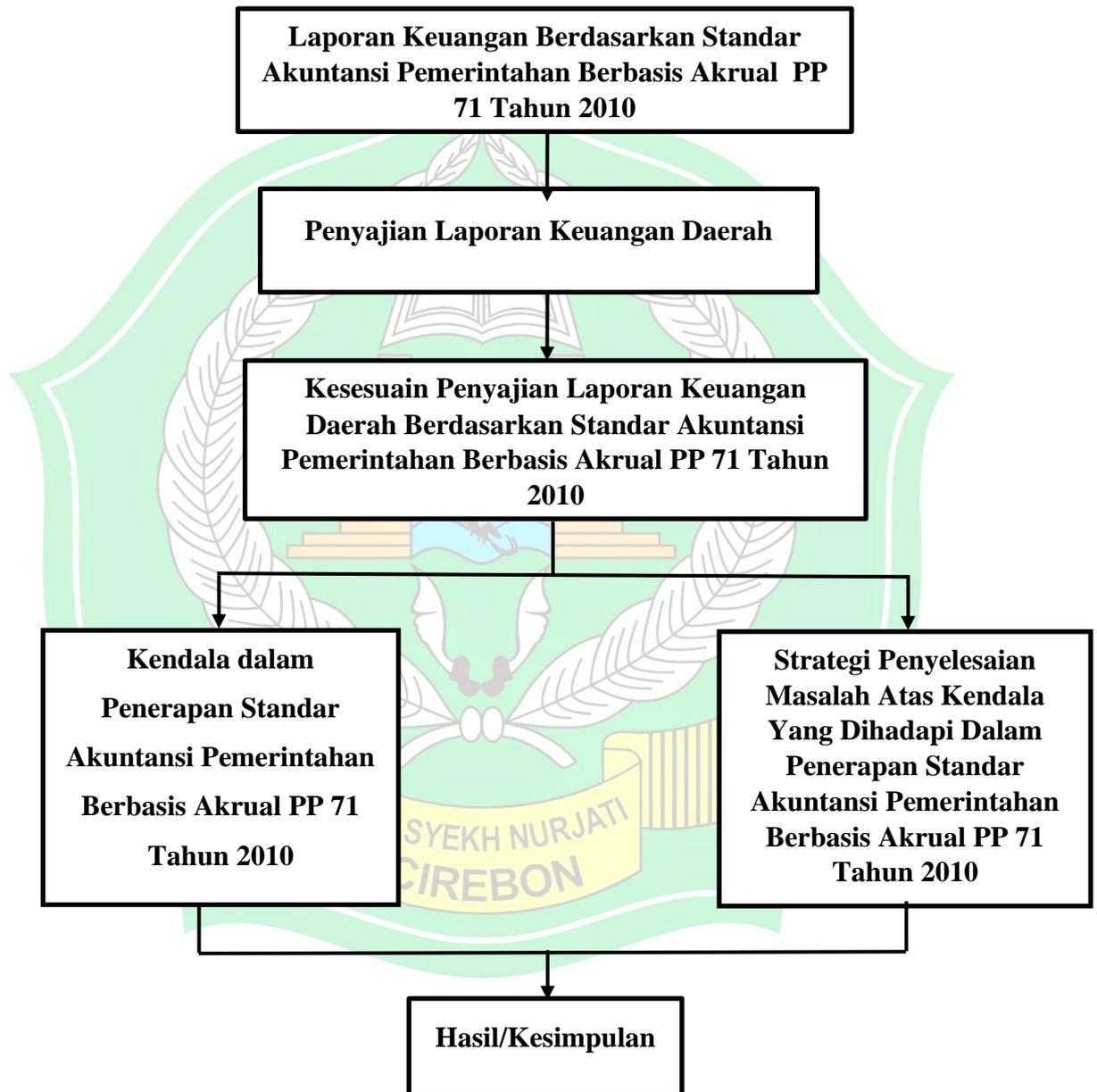
Dalam proses menuju terjadinya perubahan yang lebih baik, pasti akan ditemui berbagai kendala yang menjadi tantangan. Tidak terkecuali dalam menerapkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010. Setiap negara mengalami kendala yang berbeda-beda dalam penerapan basis akrual. Harun (2009) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diantaranya: penyusunan standar yang tidak independen, produk hukum yang saling bertentangan, minimnya dukungan politik elit pemerintah, kurangnya respon dari Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat, kurangnya staf yang berkualitas serta kendala reformasi akuntansi pada tingkat pemerintah daerah (Risnarningsih, 2016).

Beberapa kendala yang dihadapi sektor publik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan, kapasitas TI, serta durasi maupun kompleksitas proses pelaksanaan. Beberapa penelitian lain juga mendapat hasil yang tidak jauh berbeda mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual (Henukh et al., 2020).

Kendala-kendala tersebut perlu ditemukan strategi penyelesaiannya. Menurut Akib (2010) menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya ataupun tingkat birokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, terdapat

kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang ditargetkan dari semua program terarah dengan baik (Jantong et al., 2019).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun sebuah kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.2. Kerangka Konseptual

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 88 Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat 45512.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.

3. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau suatu cara yang dipilih secara spesifik untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset (Purnia & Alawiyah, 2020). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan studi komparatif sehingga dapat diartikan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dan studi komparatif.

Sukmadinata (2011) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan terkait fenomena-fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alamiyah maupun hasil rekayasa manusia, dengan lebih memperhatikan pada karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan (Utami et al., 2021).

Adapun penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan terkait bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010, menjelaskan terkait bagaimana penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan, menjelaskan terkait kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kuningan serta menjelaskan

terkait strategi penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi tersebut.

Studi komparatif merupakan suatu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih terhadap dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2006).

Adapun studi komparatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan kesesuaian antara penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1) Data Kualitatif

Menurut Suliyanto (2005) data kualitatif adalah suatu data dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Pada data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat (Muliawati, 2020). Sedangkan menurut Salahudin (2018) data kualitatif adalah jenis data yang bukan angka, baik secara lisan maupun tulisan.

Adapun data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kuningan.

2) Data Kuantitatif

Menurut Suliyanto (2005) data kuantitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran (Muliawati, 2020). Sedangkan menurut Salahudin (2018) data kuantitatif adalah jenis data berbentuk angka yang diperoleh dari kantor tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Adapun data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Kuningan selama satu periode pelaporan tahun 2021.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Menurut Suliyanto (2005) data primer adalah suatu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama (Muliawati, 2020).

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan kepala sub bidang akuntansi, staf akuntansi, dan administrator aplikasi SIPKD 90 BPKAD Kabupaten Kuningan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan serta kendala yang dihadapi dalam proses penyajian tersebut.

2) Data Sekunder

Menurut Suliyanto (2005) data sekunder adalah suatu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Muliawati, 2020). Sedangkan menurut Sugiyono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada para pengumpul data, misalnya melalui pihak lain atau melalui dokumen.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Kuningan tahun 2021.

6. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan berdasarkan PP 71 Tahun 2010.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber data. Adapun triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Hardani et al., 2022)

Sedangkan teknik triangulasi sumber data menurut Pradistya (2021) adalah suatu teknik untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Pradistya, 2021). Adapun teknik triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Menurut Sugiono (2014) observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar (Muliawati, 2020). Sedangkan menurut Bungin (2007) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui kegiatan pengamatan dan pengindraan.

Adapun observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada BPKAD Kabupaten Kuningan dengan cara mengamati dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

2) Wawancara

Menurut Suliyanto (2014) wawancara adalah suatu teknik pengambilan data dimana peneliti terlibat secara langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden (Muliawati, 2020). Sedangkan menurut Yusuf (2017) wawancara (*interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara

pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala sub bidang Akuntansi, Administrator Aplikasi SIPKD 90, dan Staf sub bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Kuningan.

3) Dokumentasi

Menurut Muliawati (2020) Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Arikunto (2011) metode dokumentasi adalah salah satu cara bagi peneliti dalam menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat, catatan harian dan sebagainya (Hadi et al., 2021).

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Kuningan periode 2021.

8. Teknik Analisis Data

Menurut Hardani, et. all (2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hardani et al., 2022)

Teknik analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, dan studi komparatif. Penggunaan teknik analisis ini dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis data dokumen, catatan lapangan, dan hasil wawancara untuk mendapatkan pengetahuan dari data, yang kemudian diformulasikan secara deskriptif untuk selanjutnya memproses data tersebut (Rijali, 2018). Adapun dalam

proses analisis data ini terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan atau verifikasi.

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu tahapan dalam analisis data sebagai suatu upaya dalam menyimpulkan data, untuk kemudian memilah-milah data kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Penggunaan reduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna (Rijali, 2018).

2) Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Adanya penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini data-data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dimulai dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Setiap kesimpulan-kesimpulan tersebut ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Dari yang awal mulanya belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Rijali, 2018).

Adapun data-data yang diperoleh untuk kemudian dilakukan serangkaian analisis data diatas ialah berupa data laporan keuangan periode 2021 pada BPKAD Kabupaten Kuningan yang selanjutnya dilihat kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP 71 Tahun 2010, kemudian dianalisis penerapannya serta data-data hasil wawancara dengan pihak kepala sub bidang akuntansi, staf akuntansi, dan administrator aplikasi SIPKD 90 di BPKAD Kabupaten Kuningan terkait penyajian laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai PP 71 Tahun 2010 sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibuat sebuah sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran secara umum kepada para pembacanya mengenai skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, halaman lembar persetujuan, halaman lembar pengesahan, halaman terkait keaslian skripsi yang dibuat, halaman terkait persetujuan publikasi karya ilmiah guna kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, halaman terkait kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta lampiran. Pada bagian ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca dalam mencari bagian penting secara tepat dan efisien.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu/*Literature Review*, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang teori-teori terkait pengertian akuntansi, pengertian akuntansi basis akrual, kelebihan akuntansi basis akrual, pengertian akuntansi pemerintahan, pengertian standar akuntansi pemerintahan, pengertian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kerangka konseptual SAP berbasis akrual, pokok-pokok penerapan SAP berbasis akrual, perdebatan penggunaan basis akrual dalam pemerintah daerah, kelebihan dan kekurangan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan, serta komponen-komponen dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kuningan, Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuningan, dan Letak Geografis BPKAD Kabupaten Kuningan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang sejarah berdirinya instansi yang diteliti, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, truktur organisasi, tugas dan wewenang/*job description*, laporan terkait hasil penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang pemaparan secara garis besar terkait hasil inti dari penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

3. Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian daftar pustaka ini berisi tentang daftar buku, daftar jurnal, daftar link website, serta daftar literatur lainnya yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi tentang informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian, kartu konsultasi, spesifikasi teknis, dan data-data lainnya yang diperlukan.

